

Judul : Utak-atik Pos Migas, Penerimaan Dipatok Naik
Tanggal : Rabu, 22 Juni 2016
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 3

► **POSTUR RAPNP 2016**

Utak-atik Pos Migas, Penerimaan Dipatok Naik

JAKARTA — Penerimaan negara dalam postur sementara RAPBNP 2016 disepakati Rp1.786,2 triliun atau naik sekitar 3% dari usulan awal pemerintah. Angka itu muncul setelah pemerintah dan parlemen menguatkan sumber penerimaan sektor minyak dan gas.

Dalam rapat kerja antara Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah, dan Bank Indonesia, Selasa (21/6), target pendapatan negara hanya turun 0,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) induk.

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan kenaikan pendapatan negara itu mayoritas disebabkan adanya kenaikan penerimaan baik pajak maupun bukan pajak (PNBP) dari sektor migas.

"Pendapatan negara meningkat Rp51,7 triliun yang berasal dari peningkatan perpajakan Rp12,1 triliun dan peningkatan PNBP 39,7 triliun. Untuk PNBP kenaikannya disebabkan oleh migas," ujarnya.

Dalam postur sementara, asumsi harga minyak mentah Indonesia (ICP) disepakati US\$40 per barel, naik dari usulan awal pemerintah US\$35 per barel dan turun dari APBN induk US\$50 per barel.

Lifting minyak dan *lifting* gas masing-masing disepakati 820.000 barel per hari dan 1,150 juta barel setara minyak per hari. Sementara itu, besaran *cost recovery* turun dari usulan US\$11 miliar menjadi US\$8 miliar.

Pemerintah menaruh target penerimaan pajak dari rencana kebijakan ini senilai Rp165 triliun di pos pajak penghasilan (PPh) non-migas. Pos penerimaan ini tercatat Rp819,5 triliun, naik 14,48% dibandingkan dengan APBN induk.

Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan dengan patokan defisit baru, akan ada pengurangan rencana penerbitan surat berharga negara (SBN).

Awalnya, dengan patokan defisit

hingga 2,48% dari PDB, ada rencana tambahan penerbitan SBN senilai Rp57 triliun. "Ya jadi sekitar Rp41 triliun lah. Dengan target baru ini kita akan ambil dari pasar domestik, apalagi ada *tax amnesty*," katanya.

Yustinus Prastowo, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) menilai masih ada celah risiko yang besar. Skenario APBN Perubahan nyatanya dimanfaatkan bukan sebagai *emergency plan* melainkan hanya justifikasi bisa direvisinya APBN.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Eko Listianto menilai pemerintah harus membuat pajak lebih rileks dan longgar sehingga dunia usaha berekspansi.

Konsumsi masyarakat kecil dan menengah bisa dinaikkan dengan mengurangi pengeluaran dari sisi komponen barang atau jasa yang diatur oleh pemerintah seperti tarif listrik, bahan bakar minyak, dan pajak. (Kurniawan A. Wicaksono/Veronika Yasinta)